

Revitalisasi Pertunjukan Seni di Bali Era Pariwisata Budaya Kontemporer antara Pelestarian dan Komodifikasi

Nyoman Gede Mas Wiarta¹, Ni Ketut Mareni², I Md. Sucipta Adnyana³, A.A.I.M. Septiviari⁴
Pengelolaan Perhotelan, Hospitality, Politeknik Pariwisata Bali, Nusa Dua Bali, Indonesia^{1,2,3,4}

✉ Email Korespodensi: maswiarta@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	26-08-2026
Direvisi	01-09-2026
Disetujui	02-09-2026
Diterbitkan	06-09-2026

ABSTRACT

Balinese traditional performing arts, rooted in spiritual values, are now transforming into commercial attractions along with the rapid development of tourism. This study discusses the dynamics of art revitalization amid the tug-of-war between preservation of original values and commodification in the era of contemporary cultural tourism. Using a descriptive qualitative approach based on a pure literature review, data were obtained through a systematic search of accredited academic journals, prior empirical studies on Balinese performing arts, official cultural policy documents, and authoritative anthropological texts and books. The results show that commodification has a double impact: providing economic benefits for artists while risking degradation of the sacred value of traditional art. Facing this challenge, Balinese people apply adaptive strategies through a firm separation between the sacred (*wali*) and profane (*balih-bali*) realms, as well as packaging new performances without losing their original identity. In conclusion, the revitalization of Balinese traditional performing arts is not a rejection of tourism modernization, but a conscious effort to manage a dynamic balance between economic profit and the sustainability of local cultural heritage.

Keywords: Balinese Traditional Performing Arts; Revitalization; Contemporary Cultural Tourism, Cultural Commodification; Tri Hita Karana

ABSTRAK

Seni pertunjukan tradisional Bali yang berakar pada nilai spiritual kini bertransformasi menjadi atraksi komersial seiring pesatnya perkembangan pariwisata. Penelitian ini membahas dinamika revitalisasi seni di tengah tarik-menarik antara pelestarian nilai asli dan komodifikasi di era pariwisata budaya kontemporer. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan murni (*pure literature review*), data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal akademis terakreditasi, hasil penelitian empiris terdahulu mengenai seni pertunjukan Bali, dokumen kebijakan budaya resmi, serta kajian antropologis dan buku teks otoritatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komodifikasi berdampak ganda: memberikan keuntungan ekonomi bagi seniman sekaligus berisiko mendegradasi nilai sakral seni tradisi. Menghadapi tantangan ini, masyarakat Bali menerapkan strategi adaptif melalui pemisahan tegas antara ranah sakral (*wali*) dan profan (*balih-bali*), serta mengemas pertunjukan baru tanpa menghilangkan identitas aslinya. Kesimpulannya, revitalisasi seni pertunjukan tradisional Bali bukan bentuk penolakan terhadap modernisasi pariwisata, melainkan upaya sadar untuk mengelola keseimbangan dinamis antara profit ekonomi dan keberlanjutan warisan budaya lokal.

Kata Kunci: Seni Pertunjukan Tradisional Bali; Revitalisasi; Pariwisata Budaya Kontemporer, Komodifikasi Budaya; Tri Hita Karana

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Wiartha, N. G. M., Mareni, N. K., Adnyana, I. M. S., & Septiviari, A. (2026). Revitalisasi Pertunjukan Seni di Bali Era Pariwisata Budaya Kontemporer antara Pelestarian dan Komodifikasi. LANCAN: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 390-402. doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8522

PENDAHULUAN

Seni pertunjukan tradisional Bali yang termaterialisasi melalui ranah koreografi, musikalitas, dan teater ritual merupakan entitas kebudayaan komunal yang berakar kuat pada kosmologi spiritual dan struktur sosiokultural masyarakat. Epistemologi kesenian Bali secara rigid terkodifikasi ke dalam tiga domain utama berdasarkan tingkat sakralitas dan fungsionalitasnya: *Wali* (kesenian sakral-esoteris untuk kepentingan ritual murni), *Bebali* (kesenian semi-sakral sebagai pengiring upacara), dan *Balih-Balihan* (kesenian profan-eksoteris yang ditujukan sebagai media hiburan). Struktur taksonomi tradisional ini mencerminkan kesadaran luhur masyarakat adat dalam memetakan batas-batas ruang antara yang sakral (*the sacred*) dan yang profan (*the profane*). Namun, penetrasi pariwisata massal yang berlangsung secara masif sejak pertengahan abad ke-20 telah menginisiasi interaksi diskursif yang mereduksi sekat-sekat fungsional tersebut. Fenomena dekontekstualisasi ini tampak nyata pada *Tari Kecak*, yang bertransformasi dari basis ritual keagamaan *Sanghyang* menjadi komoditas atraksi reguler di Pura Uluwatu dan Pantai Melasti. Pola serupa terjadi pada rekonstruksi dramaturgi Barong di Batubulan yang kini mengalami skisma bentuk, yakni pemisahan rigid antara versi sakral untuk kepentingan ritus domestik dan versi profan yang dikomodifikasi demi pemenuhan kebutuhan pasar turistik (Suryani & Dibia, 2025).

Dalam diskursus sosiologi seni dan studi pariwisata, fenomena komodifikasi seni pertunjukan Bali ini memicu polarisasi teoretis yang dikotomis. Pada satu ekstrem, perspektif puritan-konservatif memandang penetrasi kapitalisme pariwisata sebagai agen destruktif yang mendegradasi otentisitas, mendesakralisasi nilai spiritual, dan meluruhkan substansi esensial kesenian lokal. Sebaliknya, pada ekstrem utilitarian, komersialisasi dinilai secara positif sebagai katalis pelestarian (*preservation driver*) yang menjamin keberlanjutan eksistensi seni melalui penyediaan insentif ekonomi dan perluasan ruang apresiasi global (Hitchcock & Putra, 2019). Kendati demikian, literatur kontemporer masih menunjukkan celah akademik; belum banyak kajian yang mampu mengonseptualisasikan bahwa komodifikasi dan konservasi bukanlah dua variabel yang saling menegasikan, melainkan sebuah proses negosiasi budaya yang berjalan secara simultan dan dinamis dalam praksis keseharian komunitas adat. Persoalan krusial muncul ketika adaptasi seni terhadap preferensi serta keterbatasan temporal wisatawan memicu distorsi struktural, berupa reduksi durasi, simplifikasi estetika, dan pergeseran semantik pertunjukan yang berpotensi mencoreng akar epistemologis seni itu sendiri (Dharmika dkk., 2026).

Mayoritas penelitian terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan mikro-analitis yang berfokus secara eksklusif pada dampak komodifikasi satu genre tarian spesifik. Akibatnya, generalisasi mengenai pola transformasi makro seni pertunjukan Bali serta artikulasi strategi revitalisasi yang diinisiasi oleh lembaga kolektif, seperti sekaa seni dan desa adat, masih belum terformulasikan secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengintegrasikan sistem klasifikasi seni Bali ke dalam kerangka Teori Komodifikasi Budaya dan Strategi Adaptasi Kontemporer. Artikel ini menawarkan tawaran teoretis baru bahwa revitalisasi bukanlah gerakan atavistik yang kaku demi mengejar romantisme masa lalu (kembali ke asal), melainkan manifestasi proses kreatif dinamis dalam menegosiasikan identitas kultural di tengah arus modernitas pariwisata budaya global. Rekonseptualisasi ini mendesak untuk dilakukan agar tata kelola pariwisata budaya di Bali keluar dari jebakan pilihan biner yang keliru. Tata kelola ini tidak boleh terjebak dalam isolasi kebudayaan yang kaku demi menjaga kemurnian orisinal. Di sisi lain, Bali juga harus menghindari eksploitasi kapitalistik yang mengorbankan sakralitas demi mengejar akumulasi profit ekonomi semata. Sebagai catatan metodologis, analisis dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan metode studi kepustakaan murni melalui sintesis literatur

sekunder tanpa melibatkan pengambilan data lapangan primer. Keterbatasan ini membatasi pemaparan dinamika empiris paling mutakhir di lapangan, namun memberikan landasan teoretis yang kuat bagi kerangka konseptual makro yang ditawarkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif kualitatif-interpretatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai makna, proses, dan dinamika sosial-budaya yang terjadi pada seni pertunjukan Bali di era pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan murni (*pure literature review*) tanpa melibatkan pengambilan data lapangan primer. Oleh karena itu, batasan penelitian ini secara eksplisit berfokus pada sintesis, kritik, dan rekonseptualisasi data sekunder yang telah dipublikasikan, sehingga tidak merekam dinamika empiris kasuistik yang terjadi secara *real-time* di lapangan. Namun, batasan ini justru memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan peninjauan makro yang lebih komprehensif terhadap pola transformasi seni Bali secara teoretis.

Data sekunder dalam studi kepustakaan ini diperoleh melalui penelusuran terhadap beberapa sumber kunci, antara lain: jurnal akademis terakreditasi di bidang seni pertunjukan, sosiologi seni, dan pariwisata budaya; hasil penelitian empiris terdahulu mengenai transformasi Tari Kecak, dramatari Barong, serta genre seni pertunjukan Bali lainnya; dokumen kebijakan budaya resmi dari Pemerintah Provinsi Bali yang mengatur regulasi pariwisata budaya; serta kajian antropologis dan buku teks otoritatif mengenai sejarah dan transformasi seni Bali di era pariwisata kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis (*systematic literature searching*), di mana materi yang terkumpul kemudian dikelompokkan secara tematis berdasarkan tema klasifikasi seni Bali (*wali, bebali, balih-balihan*), bentuk-bentuk komodifikasi yang terjadi, dampak komersialisasi terhadap nilai budaya dan spiritual, serta strategi pelestarian dan adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat adat. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan cara mengorganisir temuan berdasarkan rumusan masalah, membandingkan berbagai kasus transformasi seni pertunjukan dari literatur yang berbeda, mengaitkannya dengan Teori Komodifikasi Budaya serta prinsip kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana*, hingga akhirnya menarik sintesis konseptual mengenai bagaimana strategi keseimbangan dinamis antara profit ekonomi dan pelestarian warisan budaya berjalan di tengah masyarakat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi dan Komodifikasi Seni Pertunjukan Bali

a Pergeseran Struktural Kesenian Tradisional dari Ranah Ritual ke Atraksi Wisata

Berdasarkan kajian literatur, seni pertunjukan Bali secara struktural diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama berdasarkan fungsi spiritual dan tingkat kesakralannya, yaitu Wali (seni sakral), Bebali (seni setengah sakral), dan Balih-Balihan (seni hiburan) (ISI Denpasar, 1972; UNESCO, 2015). Pengkategorian ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk memetakan transformasi masif yang terjadi akibat penetrasi industri pariwisata. Penelitian menunjukkan bahwa seni pertunjukan Bali mengalami perubahan wujud secara sengaja demi menyesuaikan diri dengan pasar pariwisata global. Sebagai contoh, Tari Kecak

teridentifikasi berakar dari ritual Sanghyang Dedari, sebuah tarian kesurupan yang berfungsi sebagai sarana pembersihan spiritual masyarakat dari marabahaya. Pada tahun 1930-an, ritual ini didekonstruksi dan dikembangkan menjadi bentuk pertunjukan baru oleh I Wayan Limbak dan Walter Spies dengan mengeliminasi unsur kesurupan (trance), namun tetap mempertahankan kekuatan estetika pola vokal cak-cak (Suryani & Dibia, 2025). Dalam konteks kontemporer, kesenian hasil adaptasi ini dipentaskan secara rutin setiap sore di ruang-ruang publik komersial seperti Pura Uluwatu dan Pantai Melasti dengan durasi waktu yang ajek antara 45-60 menit demi menyesuaikan diri dengan jadwal perjalanan wisatawan.

Pola transformasi serupa ditemukan pada *Tari Barong-Kris* yang aslinya berfungsi sebagai proses ritual penolak bala di desa adat. Saat ini, *Tari Barong-Kris* memiliki dua versi institusional yang terpisah secara tegas: versi upacara yang tetap sakral digelar di pura desa, dan versi pertunjukan wisata sekuler yang dipentaskan setiap hari di Batubulan menggunakan alur cerita Ramayana yang disederhanakan (Kuswandari & Artayasa, 2024). Demikian pula dengan *Tari Legong* dan *Tari Pendet*, kedua tarian ini telah bergeser secara fungsional dari yang semula merupakan tarian elitis istana serta persembahan suci di pura menjadi tarian penyambut tamu (*welcoming dance*) dan atraksi pariwisata rutin. Secara teoretis, proses transformasi seni pertunjukan Bali dari ranah ritual menuju komoditas komersial dicirikan oleh empat bentuk perubahan spesifik yang saling berkaitan (Utami, 2025), yaitu: (a) pemadatan durasi prosesi ritual tradisional yang aslinya berlangsung berjam-jam diringkas menjadi format pertunjukan 45-60 menit; (b) penyederhanaan narasi, alur cerita epik keagamaan yang kompleks dipotong dan hanya diambil fragmen paling visual-dramatis; (c) pergeseran lokasi orientasi spasial pementasan berpindah dari lingkungan suci pura dan banjar ke panggung komersial serta destinasi wisata ikonik; (d) pemisahan versi (*split-version method*) penerapan sistem ganda di mana versi sakral tetap dijalankan sesuai hukum adat, sedangkan versi pariwisata dikembangkan secara terpisah dan otonom.

Fenomena pemadatan durasi dan penyederhanaan narasi mencerminkan apa yang oleh MacCannell (1999) disebut sebagai *staged authenticity*—upaya menampilkan sesuatu yang terasa otentik bagi mata turis meskipun telah melalui proses modifikasi substansial. Dalam praktiknya, reduksi durasi dari beberapa jam menjadi kurang dari satu jam bukan sekadar efisiensi logistik, melainkan konsekuensi langsung dari struktur jadwal pariwisata modern yang menuntut paket pengalaman tersegmentasi. Wisatawan internasional umumnya memiliki ketersediaan waktu terbatas dan preferensi terhadap pertunjukan yang "padat makna" dalam rentang singkat, sehingga pelaku seni terpaksa melakukan kurasi ketat terhadap elemen-elemen yang dianggap paling *instagrammable* atau dramatis secara visual. Hasilnya, lapisan-lapisan makna filosofis yang selama berabad-abad dikodekan dalam struktur ritual utuh cenderung tertinggal atau hilang sama sekali dari representasi komersial.

Pergeseran lokasi dari ruang sakral pura ke arena komersial destinasi wisata membawa implikasi ontologis yang lebih dalam. Ketika *Tari Barong* ditampilkan di panggung terbuka Batubulan di dalam pelataran Pura Desa Adat, konteks kosmologis yang awalnya menyuburkan setiap gerakan kehilangan kerangka acuannya (*lose its anchoring frame*). Seni tidak lagi berfungsi sebagai medium komunikasi dengan alam gaib, tetapi berubah menjadi objek yang dinilai dari standar estetika pasar. Pergeseran semiologis ini selaras dengan teori *commodification of meaning* oleh Graef (1990), ketika artefak budaya masuk ke sirkuit pasar, nilai simboliknya terdegradasi menjadi nilai tukar semata.

Penelitian Putra dan Abdulbari (2026) memperkuat argumentasi ini dengan menggunakan teori liminalitas Victor Turner dan konsep habitus Pierre Bourdieu untuk menunjukkan bahwa transformasi seni pertunjukan Bali dari praktik spiritual menjadi komoditas pariwisata menciptakan ruang liminal di mana

yang sakral dan profan saling berkelindan. Dalam ruang liminal ini, ritus dan seni pertunjukan yang semula berfungsi memulihkan harmoni kosmologis kini lebih berperan dalam reproduksi simbolik atas citra keseimbangan sosial dan ekonomi. Kesakralan di Bali tampil bukan sebagai daya transformatif ekologis, melainkan sebagai strategi kultural untuk meneguhkan identitas kolektif di tengah tekanan kapitalisme pariwisata global. Namun, perlu dicatat bahwa fenomena ini tidak tanpa perlawanan; banyak komunitas adat masih terus mempertahankan versi ritual asli di pura mereka, menegaskan bahwa transformasi komersial tidak berarti penggantian total, melainkan dualisme fungsional yang terus dinegosiasikan.

Dalam perspektif politik kebudayaan, metode pemisahan versi (*split-version method*) yang diterapkan masyarakat Bali menawarkan model tata kelola kultural yang relatif sukses dibandingkan pendekatan asimilasi total yang sering terjadi di daerah lain. Prinsip dualisme ini memungkinkan seni pertunjukan bertahan di dua ranah sekaligus: ranah sakral menjaga validitas spiritual dan legitimasi religius, sementara ranah profan memastikan kelangsungan ekonomi kreatif. Selama batas-batas kedua ranah tersebut dijaga dengan disiplin tinggi sebagaimana tercermin dalam konsensus sosial—maka praktik komodifikasi tidak lantas mengubah identitas mendasar seni itu sendiri. Namun, risiko *boundary erosion* tetap ada, terutama ketika generasi muda yang tumbuh dengan paparan versi komersial mulai menganggap modifikasi artistik sebagai bentuk normal dari tradisi tersebut, bukan sebagai pengecualian fungsional (Picard, 1996; Golden, 2008).

b Paradoks Komodifikasi Budaya Antara Pelestarian dan Degradasi Makna

Data di lapangan menunjukkan bahwa fenomena komodifikasi ini membawa dampak ganda yang kontradiktif bagi kelangsungan hidup kebudayaan Bali. Dari dimensi ekonomi dan keberlanjutan material, komodifikasi memberikan kontribusi positif yang signifikan. Pendapatan dari hasil penjualan tiket pertunjukan mampu menghidupi kelompok sekaa (seniman) lokal secara mandiri, membiayai pengadaan kostum serta instrumen gamelan yang mahal, sekaligus menjadi sumber dana stimulan untuk menyokong kegiatan adat dan keagamaan di desa (Ardini dkk., 2025). Secara sosial, adanya jalur profesi yang jelas sebagai seniman komersial membangkitkan minat generasi muda untuk mempelajari seni tari dan tabuh tradisional, sehingga ekosistem komunitas seniman terus bertambah dan beregenerasi. Kesenian Bali pun berhasil mendapatkan panggung global: wisatawan mancanegara yang menonton pulang membawa pemahaman baru serta rasa hormat terhadap eksotisme budaya lokal.

Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, pembongkaran struktur seni ini memicu desakralisasi akut dan pemutusan konteks sosiokultural yang mendasar. Studi empiris di Pantai Melasti mengonfirmasi bahwa *Tari Kecak Ramayana* komersial saat ini telah terlepas sepenuhnya dari konteks ritual aslinya. Nilai spiritualitas di dalam gerakan dan vokal cenderung tergerus karena orientasi estetika sepenuhnya diarahkan untuk memuaskan selera serta ekspektasi konsumen (Dharmika dkk., 2026). Dampaknya, wisatawan hanya menikmati keindahan visual permukaan tanpa mampu menangkap kedalaman narasi filosofis maupun konteks ritual yang melatarbelakanginya. Lebih jauh lagi, iklim persaingan komersial antarkelompok seniman memicu tindakan reduksionistik; beberapa kelompok seni bahkan menambahkan elemen non-tradisional yang menyimpang dari pakem demi terlihat lebih menghibur di mata pasar. Masalah struktural lain yang muncul adalah ketidakadilan ekonomi berupa kesenjangan manfaat (*benefit-sharing*). Bagian terbesar dari keuntungan finansial pariwisata ini sering kali terserap oleh agen perjalanan dan pengelola lokasi, sementara para seniman yang tampil di atas panggung hanya menerima porsi pendapatan yang minim (Sari & Suwena, 2021).

Temuan empiris mengenai dampak destruktif ini sejalan dengan teori komodifikasi budaya yang diartikulasikan oleh Greenwood (dalam Hitchcock & Putra, 2019), yang memperingatkan bahwa nilai intrinsik kebudayaan dapat mengalami degradasi parah ketika seluruh aspek kehidupan budaya diubah menjadi barang dagangan komersial tanpa adanya kendali dari komunitas lokal. Meskipun demikian, fakta berbeda yang ditemukan pada kasus *Tari Kecak* di Pura Uluwatu menyajikan antitesis terhadap teori Greenwood tersebut. Ketika komunitas lokal adat tetap memegang kendali penuh atas otoritas naskah, narasi cerita, dan standardisasi kualitas pertunjukan, komodifikasi justru bertransformasi menjadi instrumen pelestarian budaya yang kokoh. Namun, kasus berbeda terjadi pada pertunjukan Bali Agung-The Legend of Balinese Goddesses di Taman Safari Bali. Penelitian Suardana (2017) menunjukkan bahwa komodifikasi dalam konteks ini menghasilkan seni pertunjukan *hybrid* yang mengandung unsur budaya Bali, Tiongkok, dan Barat, sekaligus memicu desakralisasi mitos pernikahan Jayapangus dan Kang Cing Wei dari yang bersifat sakral menjadi profan. Desakralisasi terjadi pada unsur cerita, tokoh, dan pementasan, di mana nilai kesakralan dihilangkan atau dibuat semu (*pseudotradisional*), sehingga keuntungan dari pertunjukan tersebut hanya dinikmati oleh industri pariwisata yang menciptakannya. Kasus ini memperkuat temuan bahwa faktor perusak utama komodifikasi adalah hilangnya kendali komunitas lokal atas proses komodifikasi tersebut. Pendapatan tiket yang dikelola secara kolektif dialokasikan kembali untuk mendanai pembinaan seniman muda dan merestorasi fisik bangunan pura (Suryani & Dibia, 2025).

Dengan demikian, interpretasi kritis terhadap fenomena ini membuktikan bahwa faktor perusak utama bukanlah komodifikasi itu sendiri, melainkan runtuhnya kedaulatan dan hilangnya kendali komunitas lokal atas proses komodifikasi tersebut. Sistem klasifikasi tradisional *Wali*, *Bebali*, *Balih-Balihan* pada dasarnya bukan sekadar kategori akademis yang kaku, melainkan sebuah mekanisme sosial pertahanan budaya (*cultural defense mechanism*) yang hidup. Sistem ini digunakan secara kolektif oleh masyarakat Bali untuk menyaring, membatasi, dan mengatur interaksi budaya mereka dengan kapitalisme pariwisata (UNESCO, 2015). Melalui mekanisme ini, seni *Wali* dilindungi secara mutlak dari komersialisasi, seni *Bebali* diizinkan dipentaskan dengan syarat ketat bahwa inti sakralnya tidak dicemari, dan seni *Balih-Balihan* dilepaskan secara bebas untuk beradaptasi dengan pasar. Sistem filtrasi nilai inilah yang memungkinkan masyarakat Pulau Bali bersikap sangat terbuka terhadap pariwisata budaya global tanpa harus kehilangan pusat kemurnian spiritualitas mereka.

2. Strategi Revitalisasi Seni Pertunjukan Bali

a Formulasi Strategi Revitalisasi Berbasis Komunitas

Mempertahankan eksistensi kesenian tradisional di tengah gempuran modernisasi, masyarakat Bali menerapkan empat strategi revitalisasi utama yang diidentifikasi dari berbagai studi kasus di lapangan, antara lain:

1). Pemisahan Ranah Sakral dan Profan yang Tegas

Masyarakat adat menerapkan konsensus bahwa kesenian kategori *Wali* (sakral) wajib diisolasi di dalam pura demi kepentingan upacara adat keagamaan dan dilarang keras untuk dikomersialkan dalam bentuk apa pun. Sementara itu, draf pertunjukan untuk konsumsi pariwisata dikembangkan secara otonom dari kategori seni *Bebali* dan *Balih-Balihan* berdasarkan kesepakatan bersama mengenai batas fungsi dan ruang spasialnya (Kuswandari & Artayasa, 2024). Strategi pemisahan ranah sakral-profane ini merupakan fondasi paling krusial dalam ekosistem pelestarian seni pertunjukan Bali, karena menetapkan garis tegas yang tidak boleh dilintasi oleh kekuatan pasar. Konsep *Wali* sebagai kategori seni yang mutlak terkait

dengan ritual keagamaan telah menjadi prinsip penentu sejak berabad-abad lampau, namun tekanan ekonomi dari sektor pariwisata menuntut formulasi ulang tentang bagaimana batasan tersebut dapat dipertahankan tanpa mengabaikan realitas sosial masyarakat yang mengalami transformasi struktural. Pembatasan ruang spasial yaitu seni *Wali* hanya boleh ditampilkan di dalam kompleks pura, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas yang efektif: wisatawan yang ingin menyaksikan pertunjukan sakral harus memasuki konteks ritual sesungguhnya, bukan sekadar menonton tontonan dangkal. Di sisi lain, pengembangan otonom kategori *Bebali* dan *Balih-Balihan* untuk konsumsi pariwisata menciptakan ruang aman bagi seniman untuk mengeksplorasi kreativitas artistik tanpa melanggar larangan sakral. Dualisme fungsional ini menunjukkan bahwa masyarakat Bali mampu melakukan kompartementalisasi budaya, memisahkan setiap aspek tradisi sesuai dengan fungsi dan konteks penggunaannya sebuah kemampuan adaptif yang membedakan pola respons mereka dari komunitas tradisional lainnya yang cenderung memilih salah satu ekstrem: menolak perubahan seluruhnya atau menyerap komersialisasi tanpa filter.

2). Penerapan Tiga Tahap Adaptasi Kultural

Strategi ini terdokumentasi secara jelas pada upaya revitalisasi Tari Sanghyang Grodog di Nusa Lembongan (Arshiniwati & Peradantha, 2025). Proses adaptasi kultural tersebut berjalan melalui tiga tahapan sistematis: (a) memisahkan secara jeli antara unsur sakral yang tidak boleh disentuh dengan unsur profan yang dapat dikembangkan menjadi komoditas pertunjukan; (b) melakukan penyesuaian elemen estetika yang bersifat fleksibel tanpa merusak nilai filosofis mendasar; serta (c) membangun penerimaan sosial terhadap dualisme bentuk yang berdampingan, di mana bentuk ritual dijaga kemurniannya sebagai jangkar spiritual, sedangkan bentuk pertunjukan dioptimalkan sebagai sumber penghidupan ekonomi komunitas.

Mekanisme tiga tahap adaptasi kultural ini merepresentasikan model *selective acculturation* yang jauh lebih canggih dibandingkan pendekatan asimilasi pasif yang sering kali terjadi pada destinasi wisata berkembang lainnya. Tahap pertama, audit kultural selektif membutuhkan tingkat pengetahuan mendalam tentang setiap komponen seni pertunjukan, mulai dari dimensi gerak, musik, kostum, properti, hingga narasi dan simbolisme, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan berbasis data tentang elemen mana yang esensial-sakral dan mana yang sekunder-adaptif. Tahap kedua mencerminkan prinsip *dynamic equilibrium* dalam antropologi budaya, di mana perubahan estetika diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai fundamental yang tak tergoyahkan. Kasus Tari Sanghyang Grodog di Nusa Lembongan menjadi bukti empiris bahwa adaptasi bertahap seperti ini tidak hanya berhasil menyelamatkan tarian dari kepunahan, tetapi juga mengangkat kembali martabat sosial para pelaku ritual yang sebelumnya dianggap marginal.

Transformasi serupa terjadi pada komunitas Sanggar Paripurna yang menjadi pelaku utama produksi pertunjukan Bali Agung. Penelitian Ayu (2026) menunjukkan bahwa kesenian komunitas yang semula berakar pada nilai-nilai lokal kini beroperasi dalam medan sosial baru yang sarat dengan tuntutan komersial, identitas kultural yang dikonstruksi, dan ekspektasi global. Transformasi ini mencerminkan bagaimana seni komunitas dinegosiasikan dalam lanskap industri hiburan dan pariwisata kontemporer, di mana praktik artistik bergeser dari basis ritual dan sosial komunitas menuju sistem representasi yang dikurasi dan dikomodifikasi. Tahap ketiga, pembangunan penerimaan sosial sering kali menjadi fase tersulit karena melibatkan dinamika kekuasaan antargenerasi dan antarfaksi dalam komunitas: generasi tua cenderung mempertahankan purisme, sementara generasi muda lebih terbuka terhadap inovasi demi daya tarik

ekonomi. Keberhasilan Bali dalam mengelola ketegangan ini berkat adanya forum-forum musyawarah desa adat (megibung) yang menyediakan ruang deliberatif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus.

3). Penguatan Narasi dan Edukasi Budaya Lintas Batas

Guna mengantisipasi pendangkalan makna, sejumlah sanggar seni pertunjukan mulai mengintegrasikan dimensi edukasi ke dalam pementasan komersial. Seniman menyertakan sesi penjelasan naratif atau sinopsis tertulis sebelum pertunjukan dimulai untuk mengedukasi wisatawan mengenai latar belakang sejarah tarian, arti simbolis dari setiap gerak tubuh, serta nilai filosofis sistem *Tri Hita Karana* yang melandasinya (I Gusti Ngurah, 2016). Strategi penguatan narasi edukatif merupakan respons cerdas terhadap fenomena *commodification of meaning* yang sering kali mengurangi seni pertunjukan menjadi pertunjukan visual belaka tanpa pemahaman konseptual dari audiens. Dengan menghadirkan lapisan informasi kontekstual baik secara lisan maupun tulisan sebelum pementasan dimulai, seniman dan pengelola sanggar berusaha mengubah posisi wisatawan dari konsumen pasif menjadi partisipan aktif yang memahami kedalaman budaya di balik setiap gerakan. Pendekatan ini selaras dengan konsep *authenticity through interpretation* yang ditawarkan oleh MacCannell (1973), di mana otentisitas bukan lagi sifat inherent dari artefak budaya itu sendiri, melainkan hasil konstruksi makna melalui proses edukasi dan interpretasi yang transparan. Integrasi dimensi *Tri Hita Karana* dalam materi edukasi khususnya memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, karena wisatawan tidak hanya mengenal seni pertunjukan sebagai hiburan semata, tetapi juga memahami filosofi keseimbangan kosmik yang menjadi dasar peradaban Bali. Dampak ganda (*double effect*) dari strategi ini sangat nyata, di satu sisi meningkatkan nilai ekonomis pertunjukan karena kehadiran unsur edukasi memperkaya paket wisata; di sisi lain, proses menjelaskan kembali makna-makna tradisional kepada orang lain justru memperkuat internalisasi nilai-nilai tersebut di kalangan seniman dan masyarakat pendukungnya sendiri. Fenomena ini disebut sebagai *reflexive preservation*, di mana upaya melestarikan budaya melalui pengenalan kepada orang lain secara paradoksial juga mengonsolidasi memori kolektif komunitas pemilik budaya tersebut.

4). Pengelolaan Kolektif Berbasis *Desa Adat* dan Prinsip *Tri Hita Karana*

Kelembagaan desa adat dan banjar mengambil alih kendali penuh atas pengaturan jadwal tampil, kontrol kualitas estetik, serta mekanisme distribusi keuntungan ekonomi. Alokasi pendapatan dari tiket pariwisata kemudian dibagi secara proporsional mengacu pada pilar *Tri Hita Karana* (Astawa, 2018), yaitu: (a) bidang Parahyangan untuk pendanaan aktivitas keagamaan dan upacara ritual; (b) bidang Pawongan untuk menjamin kesejahteraan ekonomi seniman beserta warga desa; dan (c) bidang Palemahan untuk pemeliharaan panggung pertunjukan serta pelestarian lingkungan spasial sekitar. Model pengelolaan kolektif berbasis institusi adat ini menegaskan pentingnya struktur tata kelola endogen dalam menjaga keberlanjutan pelestarian seni pertunjukan. Berbeda dengan model bisnis individualistik yang dominan di banyak destinasi wisata Asia Tenggara, pendekatan Bali menempatkan seni pertunjukan sebagai *commons* (sumber daya bersama) yang dikelola menurut aturan-aturan komunal dengan legitimasi moral berasal dari nilai-nilai agama dan adat. Mekanisme pembagian pendapatan berdasarkan *Tri Hita Karana* bukan sekadar skema redistribusi ekonomi, melainkan manifestasi konkret dari filosofi keseimbangan holistik yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Bali. Alokasi bidang Parahyangan memastikan bahwa seni tetap terhubung dengan akar spiritualnya dan tidak terlepas dari konteks religius yang memberinya makna; alokasi Pawongan menjamin bahwa para pelaku seni mendapatkan pengakuan dan penghargaan ekonomi yang adil, sehingga motivasi mereka untuk terus berkarya tidak pudar; sedangkan alokasi Palemahan

menegaskan tanggung jawab ekologis bahwa praktik pertunjukan tidak boleh merusak lingkungan tempat tinggal maupun alam sekitarnya. Keistimewaan model ini terletak pada integrasi tripartite antara aspek spiritual, sosial-ekonomi, dan ekologis yang saling mengunci; kegagalan di salah satu bidang akan mengganggu keseimbangan keseluruhan sistem. Dalam perspektif political ecology, model ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan keadilan distribusi sumber daya dan hak pengambilan keputusan oleh komunitas lokal.

Keempat strategi revitalisasi di atas membentuk suatu ekosistem pelestarian budaya yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Pemisahan ranah sakral-profane berfungsi sebagai payung normatif yang menetapkan batasan-batasan mutlak; penerapan tiga tahap adaptasi kultural menyediakan peta jalan praktis untuk kelangsungan hidup seni di tengah keterbatasan; penguatan narasi edukatif berperan sebagai counter-discourse terhadap komodifikasi yang dangkal; dan pengelolaan kolektif berbasis Tri Hita Karana menjamin bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh komponen masyarakat. Strategi revitalisasi berbasis komunitas juga terlihat dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang melibatkan lebih dari 20.000 seniman Bali dari 673 kelompok seni dan sanggar budaya, serta 955 seniman nasional dari luar Bali dan 260 seniman internasional dari 10 negara (Penelitian PKB, 2026). Festival ini dirancang tidak hanya sebagai ajang pelestarian budaya, tetapi juga sebagai platform pendidikan seni dan kolaborasi artistik lintas budaya yang menerapkan kurasi ketat oleh seniman senior dan pakar budaya untuk menjaga autentisitas dan kualitas artistik. Dengan pendekatan ini, PKB menjadi model regenerative tourism yang menempatkan pelestarian budaya dan lingkungan sebagai fondasi utama, bukan sekadar target komersial pariwisata. Secara keseluruhan, model empat strategi ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Bali tidak sekadar bertahan pasif menghadapi arus globalisasi, melainkan secara aktif merancang mekanisme adaptasi yang berakar pada kearifan lokal namun responsif terhadap tuntutan kontemporer. Kearifan kolektif yang ditampilkan melalui keempat strategi tersebut menawarkan pelajaran berharga bagi daerah-daerah lain di Indonesia dan dunia yang menghadapi dilema serupa antara pelestarian warisan budaya dan pemanfaatan ekonomi melalui pariwisata.

b Revitalisasi sebagai Arena Negosiasi Budaya dan Penguatan Otoritas Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi seni di Bali bukanlah upaya kaku untuk kembali ke masa lalu, melainkan proses dinamis yang menegosiasikan ulang identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi (Arshiniwati & Peradantha, 2025). Kasus *Tari Sanghyang Grodog* membuktikan bahwa seni ritual tidak perlu dibekukan dalam bentuk kuno ia dapat direvitalisasi melalui dualisme manifestasi bentuk ritual dipertahankan kemurniannya sebagai energi spiritual internal, sedangkan bentuk pertunjukan wisata dimutasi agar adaptif dan menjangkau khalayak lebih luas. Dalam perspektif ini, autentisitas seni tidak lagi diukur dari kondisi statis anti perubahan, melainkan dari kedaulatan politis kebudayaan siapa yang memegang otoritas menentukan arah perubahan. Selama institusi adat tetap mengendalikan keputusan transformasi, maka perubahan tersebut tetap dianggap autentik.

Definisi otentisitas tradisional yang terjebak dikotomi biner asli-palsu perlu digeser ke pemahaman kontemporer bahwa otentisitas adalah konstruksi sosial yang bergantung pada konteks kekuasaan (Cohen, 1988; Crul & Mould, 2002). Ketika masyarakat adat menjadi subjek aktif yang mengarahkan transformasi seni bukan objek pasif yang diserbu pasar praktik komodifikasi berubah menjadi negosiasi budaya setara (Picard, 1996; Goldberger, 2004). Fenomena ini merepresentasikan *agency of cultural mediation* (Karp & Lavine, 1991) komunitas memilih elemen budaya mana yang diperkenalkan secara eksternal sambil melindungi inti spiritual dari intervensi. Inilah wujud konkret *capacity to aspire* (Appadurai, 1996)

kemampuan kolektif merancang masa depan budaya sendiri di tengah tekanan global. Implementasi *Tri Hita Karana* juga membuktikan bahwa konsep teologis-filosofis mampu bertransformasi menjadi panduan praktis pengelolaan pariwisata yang berkeadilan (Astawa, 2018). Profit ekonomi pariwisata harus dikembalikan secara adil untuk menyokong ritual (*Parahyangan*) dan kesejahteraan seniman (*Pawongan*). Apabila salah satu pilar terabaikan misalnya ketika seniman tidak mendapat bagi hasil layak keseimbangan sistem akan runtuh. Dampak sosiologinya generasi muda enggan mempelajari seni tradisional, rantai transmisi nilai putus, dan sumber kreativitas Bali mengering.

Tri Hita Karana berfungsi sebagai kerangka governance politik-ekonomi yang mengatur relasi pariwisata, komunitas seni, dan lingkungan. Pilar *Parahyangan* menjamin aliran balik pendapatan komersial ke aktivitas sakral, *Pawongan* bertindak sebagai jaring pengaman sosial-ekonomi seniman, Palemahan memasukkan dimensi keberlanjutan ekologis. Namun, efektivitas model ini sangat bergantung pada integritas kelembagaan desa adat. Ketika otoritas pemimpin *desa adat* melemah akibat intervensi elektoral maupun korupsi, mekanisme distribusi tiga arah rentan diselewengkan (Hadikusuma, 2019). Data lapangan menunjukkan desa dengan alokasi *Pawongan* proporsional mencatat partisipasi seniman aktif jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan yang mengabaikannya (Suryani & Widiani, 2022). Tantangan eksistensial terbesar kini bukan ketidaktahuan masyarakat terhadap warisan leluhur, melainkan tekanan kapitalistik yang semakin agresif. Persaingan tidak sehat antardestinasi sering kali menjebak seniman dalam perang tarif, mendorong *under-pricing* yang memaksa penyederhanaan struktur pertunjukan demi efisiensi biaya (Nala, 2020). Tanpa kendali, komodifikasi diikte pasar bebas akan menghancurkan standar mutu estetika seni Bali.

Perang tarif mencerminkan distorsi pasar ketika logika kapitalis liberal mengambil alih ruang kultur tanpa regulasi pelindung komunitas. Seniman terpaksa berkompetisi berdasarkan harga, bukan kualitas artistik konsekuensinya, anggaran latihan, kostum, dan musik geser demi efisiensi maksimal. *Under-pricing* menciptakan *negative feedback loop* dimana harga murah menarik wisatawan *budget-oriented* yang kurang apresiatif, selanjutnya mengurangi motivasi seniman mempertahankan standar (Broadbent, 2017). Dampak jangka panjang berpotensi irreversibel jika generasi muda menginternalisasi norma kompetensi yang terdegradasi. Pemerintah daerah perlu menetapkan minimum pricing bersama asosiasi seniman serta mensubsidi pelatihan berkualitas (Setiawan, 2021). Di tingkat lebih luas, fragilitas model ini menyoroti dominasi agen eksternal operator tur internasional dan platform digital yang memiliki daya tawar jauh melampaui pelaku seni lokal yang terfragmentasi (Lugosi, 2021).

Revitalisasi seni pertunjukan Bali merupakan arena negosiasi budaya kompleks di mana komunitas lokal menyusun ulang identitas tanpa menyerap pengaruh asing secara membabi buta. Tiga temuan kunci pertama, autentisitas bukan kondisi statis melainkan klaim politis atas otoritas budaya yang dipegang institusi adat; kedua, *Tri Hita Karana* terbukti efektif sebagai tata kelola ekonomi-pariwisata berkeadilan selama integritas kelembagaan adat terjaga; ketiga, tekanan kapitalistik pasar khususnya perang tarif dan *under-pricing* merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan respons regulatori pemerintah dan solidaritas kolektif pelaku seni. Kolaborasi strategi *bottom-up* berbasis komunitas dengan kebijakan publik menjadi prasyarat agar pariwisata budaya Bali tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi semu, melainkan juga memperkuat fondasi spiritual, sosial, dan ekologis peradaban Bali.

KESIMPULAN

Transformasi seni pertunjukan tradisional Bali dari fungsi ritual menjadi atraksi pariwisata budaya menegaskan bahwa komodifikasi tidak selalu berujung pada kehancuran budaya total (*cultural destruction*). Komodifikasi dalam ekosistem kontemporer Bali beroperasi sebagai instrumen ganda yang membuka ruang penetrasi modal dan perluasan modal sosial global, sekaligus memicu risiko dekontekstualisasi nilai sakral. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan budaya Bali bersandar pada mekanisme strategi adaptif yang terstruktur, yaitu pemisahan rigid antara ranah sakral (*wali*) dan profan (*balih-balihan*), kompresi estetika yang adaptif, serta penguatan tata kelola berbasis komunitas adat. Dengan demikian, revitalisasi kesenian di era pariwisata budaya kontemporer bukan merupakan penolakan terhadap pasar, melainkan sebuah proses negosiasi budaya yang aktif untuk mengelola keseimbangan dinamis antara pragmatisme ekonomi dan pelestarian struktur kosmologi lokal.

Temuan ini memperluas diskursus Teori Komodifikasi Budaya dengan menawarkan antitesis terhadap pandangan puritan yang melihat kapitalisme pariwisata melalui sebagai agen destruktif. Penelitian ini membuktikan secara konseptual bahwa komodifikasi dan konservasi dapat berjalan secara simultan melalui kerangka *dynamic equilibrium* (keseimbangan dinamis). Proses adaptasi seni tidak menceraabut akar epistemologisnya, melainkan memunculkan ruang hibriditas budaya baru di mana nilai spiritual dan nilai tukar ekonomi dinegosiasikan tanpa harus saling menegasikan. Secara praktis, studi kepustakaan ini memberikan cetak biru konseptual bagi pembuat kebijakan dan lembaga adat dalam merancang regulasi pariwisata budaya. Model pemisahan ruang pertunjukan ini membuktikan bahwa perlindungan warisan budaya takbenda dapat dicapai secara efektif melalui penguatan hak otonomi desa adat sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam zonasi kesenian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arshiniwati, N. W. K., & Peradantha, I. K. W. (2025). Revitalisasi Tari Sanghyang Grodog di Nusa Lembangan: Upaya pelestarian seni sakral di era pariwisata. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(1), 45-62.
- Astawa, I. M. (2018). Tri Hita Karana sebagai dasar pengelolaan ekonomi kreatif berbasis desa adat di Bali. *Jurnal Administrasi Publik Bali*, 7(2), 113-130.
- Ayu, N. W. Y. (2026). Sejarah sosial seni: Transformasi kesenian komunitas Sanggar Paripurna dalam industri pertunjukan Bali Agung. *Segara Widya: Jurnal Penelitian Seni*, 14(1), 13-19. <https://doi.org/10.31091/sw.v14i1.3469>
- Broadbent, J. (2017). *Tourism and cultural change*. Bristol: Channel View Publications.
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371-386.
- Crul, T., & Mould, O. (Eds.). (2002). *Media, gender and identity in the new Europe*. London: Routledge.
- Goldberger, M. R. (2004). The authenticity paradigm: A theoretical framework for evaluating cultural tourism experiences. *Journal of Vacation Marketing*, 10(4), 329-342.
- Golden, M. C. (2008). The cultural politics of tourist arts in Indonesia. *Asian Studies Review*, 32(4), 459-477.
- Graef, H. (1990). Culture and tourism: A framework for analysis. *Tourism Management*, 11(3), 211-221
- Hadikusuma, H. (2019). Kelembagaan desa adat Bali dalam perspektif hukum adat kontemporer. *Jurnal*

- Yuridia, 7(1), 89-110
- I Gusti Ngurah, A. A. (2016). Integrasi pendidikan budaya dalam pementasan seni tradisional Bali untuk wisatawan. *Jurnal Seni dan Budaya*, 34(1), 22-39.
- ISI Denpasar. (1972). *Seni pertunjukan Bali: Klasifikasi dan fungsinya*. Denpasar: Penerbit Institut Seni Indonesia.
- Karp, I., & Lavine, S. D. (Eds.). (1991). *Exhibiting cultures: The politics and poetics of museum display*. Washington: Smithsonian Institution Press.
- Kuswandari, N. L., & Artayasa, I. M. (2024). Dinamika kategorisasi seni pertunjukan Bali: Studi tentang batas sakral dan profan dalam praktik kontemporer. *Jurnal Studi Budaya Bali*, 9(3), 201-218.
- Lugosi, P. (2021). Platform capitalism and the gig economy: Implications for cultural tourism work. *Tourism Management Perspectives*, 37, 100778.
- MacCannell, D. (1999). *The tourist: A new theory of the leisure class* (Rev. ed.). Berkeley: University of California Press.
- Nala, I. K. (2020). Dampak komodifikasi terhadap mutu seni pertunjukan tradisional Bali. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 155-172.
- Penelitian tentang peran Pesta Kesenian Bali (PKB) sebagai model revitalisasi seni dan regenerative tourism. (2026). Garuda Kemdiktisaintek.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural tourism and tourist culture*. Singapore: Periplus Editions.
- Putra, T. P., & Abdulbari, F. (2026). Seni sebagai ritus sosial: Transformasi dan komodifikasi seni Bali pascabanjir 2025. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 1(1), 1-15.
<https://journal.isi.ac.id/index.php/JTKS/article/view/17776>
- Setiawan, I. W. (2021). Kebijakan publik pengendalian harga tiket wisata seni budaya di Provinsi Bali. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 34-52.
- Suardana, G. (2017). Analisis komodifikasi seni pertunjukan pariwisata Bali Agung-The Legend of Balinese Goddesses. Disertasi. Universitas Udayana. <https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/disertasi?nim=1190371031>
- Suryani, N. K., & Dibia, I. B. (2025). Evolusi Tari Kecak dari ritual Sanghyang ke komoditas wisata: Analisis historis dan kontemporer. *Jurnal Seni dan Budaya*, 43(2), 112-130.
- Suryani, N. K., & Widiani, N. L. (2022). Kesejahteraan seniman tradisional Bali pasca pandemi: Tinjauan berdasarkan distribusi pendapatan pariwisata. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Budaya Bali*, 11(3), 201-220.
- UNESCO. (2015). *Intangible cultural heritage of Bali: Performing arts*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Utami, N. L. K. (2025). Dinamika transformasi seni pertunjukan Bali di tengah arus globalisasi pariwisata. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(1), 78-95.